

Hoax dan Bahaya Penggunaan Media Sosial Bagi Remaja di Bali Terhadap Citra Wilayah

Ilham Prisgunanto¹, Syafruddin²

1) dan 2) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lemdik Polri
E-mail: prisgunanto@gmail.com¹, siwadin009@gmail.com²

Article History

Received: 1 Juli 2023

Revised: 8 Juli 2023

Accepted: 18 Juli 2023

Keyword: Bali, Hoax, Social media, ITE Law

Abstract:

Bali is a well-known tourist destination in Indonesia which has become a concern after bad narratives circulated from recent social media posts through the attitude of foreign tourists who commit real criminal acts. This is a highlight of the Balinese people's understanding of the use of social media, especially in addressing hoax cases. Community service activities want to see an understanding of the use of social media and hoax issues there. When socialization was carried out in a number of places such as security posts, traditional villages and schools, their understanding of social media was minimal from a legal standpoint. Counseling on social media and hoax issues is provided by providing an understanding of the legality of existing laws with the existence of the Press Law and ITE Law which are the basis for prosecution. After counseling, the community service participants understand and fully understand the dangers of creating content that is dangerous for security and order.

PENDAHULUAN

Bali adalah daerah kunjungan wisata yang terkenal di Indonesia karena keindahan alam, keunikan budaya, serta keramahmatan orangnya. Tujuan destinasi wisata Bali sudah ada sejak zaman kuno, alhasil tidak dapat dihindari bahwa Bali begitu banyak turis dan pendatang di sana. Eksotik wilayah menjadi salah satu daya tarik yang menjadi magnet wisatawan mau datang bahkan menetap di Bali. Dengan sedemikian banyaknya para wisatawan di Bali tidak dapat dihindari akan munculnya gesekan dan benturan antar orang di sana.

Adalah sesuatu yang wajar bila begitu banyaknya turis di sana begitu marak dengan kejadian kriminal yang muncul sejalan dengan pergerakan dinamika orang di dalamnya. Bali menjadi persinggahan semua orang dari berbagai Negara dan negeri dan ini menjadi kendala terbesar industri wisata di Bali saat ini. Diakui bahwa hingga tahun 2020 saja sudah ada 2.923 kasus kriminal yang terjadi di Bali. Tercatat bahwa 475 kasus sendiri terjadi di kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi yang merupakan daerah utama destinasi wisatawan.

Harkamtibmas yang menjadi pondasi dasar industri wisata bisa menjadi jaminan orang untuk datang dan berkunjung ke Bali. Tanpa ada jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak mungkin perkembangan ekonomi dan wisata bisa tumbuh dengan cepat. Dengan dinamisasi ekonomi dari sektor perdagangan imbas dari industri wisata menyebabkan provinsi Bali menjadi daerah seksi bagi pelaku-pelaku bisnis di wilayah provinsi yang bersebelahan dengan Bali, sebut saja Jawa Timur, NTB dan NTT.

Kondisi ini dibuktikan dengan sedemikian membaurnya suku lain di samping orang Bali sendiri di Denpasar. Terbukti Denpasar sebagai pusat perekonomian tercatat banyak migrasi datang ke sana untuk sekedar mengadu nasib untuk perbaikan hidup. Imbasnya jelas adalah meningkatnya jumlah penduduk di Bali yang terpusat hanya di Denpasar. Alhasil lambat laun Denpasar termasuk kota yang memiliki kepadatan yang sama dengan Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lain. Di Denpasar sendiri banyak penduduknya sedemikian dinamis, ada yang dari Banyuwangi Jawa Timur, NTT (Kupang) bahkan sebagian NTB yang memang beraktivitas bisnis di sana.

Kepadatan penduduk dan banyaknya transaksi bisnis di Bali karena wisata menyebabkan banyak kejahatan yang muncul di Bali dan berakhir dengan memperburuk citra Bali sebagai daerah destinasi kunjungan wisata di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2020 sebanyak 2.923 kasus pidana terjadi di provinsi Bali, khusus daerah Denpasar ada 475 kasus pidana (BPS Provinsi Bali, 2020). Diakui kepadatan penduduk Bali terutama kota Denpasar karena didukung kunjungan wisata di sana. Di satu sisi berdampak positif untuk perekonomian namun di lain sisi berdampak negatif untuk potensi konflik sosial dan tindak kejahatan (Lu Peng, Lin Wang, Xue-Yi Ai & Yu-Rong Zen, 2020).

Berbagai konflik bisa terjadi di Bali, seperti pemicu konflik sosial yaitu: ketidaksepahaman budaya Bali dengan pendatang. Pro dan kontra masalah benturan agama, juga ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan adat Bali yang bertentangan. Tak heran mencuat tindak kejahatan yang lebih disebabkan ketimpangan kebijakan tadi yang menyebabkan perubahan drastis dalam sector ekonomi, personal (psikologi dan pendidikan) juga faktor situational/lingkungan (Priyanto, 2012).

Kasus-kasus kriminal yang mencuat di Denpasar selain isu konflik social juga kondisi bangunan tempat tinggal yang tidak sesuai juga aksi premanisme, kejahatan jalanan dan kekerasan yang ada di masyarakat. Bila tindak kejahatan ini dibiarkan bisa jadi akan memperburuk citra Bali dan berakhir dengan merosotnya jumlah kunjungan wisata di sana dan menyebabkan Bali akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah.

Alasan program pengabdian masyarakat ini untuk mengkaji faktor yang orang lain belum bahas. Pemecahan masalah-masalah sosial dengan sektor wisata dengan pendekatan pada pemanfaatan media sosial yang terindikasi hoax, hatespeech, bullying. Apalagi diketahui masyarakat Bali begitu mudah terprovokasi dengan kehadiran banyak turis di sana. Hal ini harus dilakukan dengan adanya kolaboratif antara Polri dengan pihak stakeholder, sehingga pengabdian masyarakat akan berimplikasi dengan rekomendasi bagi pemerintah daerah Bali sebagai daerah wisata dan implikasi dengan Pendidikan.

METODOLOGI PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Polrestabes Bali ini, untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahan masalah. Metode yang digunakan adalah

metode observasi/pengamatan, diskusi terarah/focus grup discussion, penyuluhan, ramah tamah dan paparan visual.

Sebagai Output yang diharapkan diperoleh dari Dianmas yang dilakukan adalah:

1. Identifikasi paradigma baru dan/atau konsep-konsep Administrasi Kepolisian, Hukum Kepolisian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Media dan Komunikasi.
2. Formulasi kebijakan dan strategi yang efektif dalam penerapan konsep-konsep guna pencegahan kejahatan dan pemecahan masalah-masalah sosial serta menyelaraskan kebijakan orang asing dengan kepentingan daerah dan Indonesia.
3. Deskripsi kompetensi Polisi RW yang profesional dan proporsional yang mewujudkan konsep Prediktif Policing, Kolaboratif Policing, dan Community Policing yang telah menjadi Program Kerja Polri saat ini: Presisi.

Persiapan

1. Merumuskan wilayah kegiatan berdasarkan karakteristik wilayah (terlampir);
2. Menentukan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya;
3. Menentukan materi kegiatan yang diberikan kepada masing-masing dosen berdasarkan tema kegiatan di atas (terlampir); dan
4. Menyusun jadwal kegiatan untuk alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam surat perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta Pengabdian masyarakat dosen STIK yang terdiri dari 4 anggota Polisi berpangkat Kombes Polisi sebagai dosen utama dan 4 dosen ASN (Aparatur Sipil Negara) berangkat dan sampai di Polda Bali.

Pada Rabu, 26 Juli 2023

- Pukul 16.30 WITA tiba dan dilanjutkan dengan ramah tamah dengan Polresta Kawasan Bandara yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag SUMDA (Sumber Daya Manusia) dan KARO SDM Polda.
- Pukul 19.00 WITA – Makan malam Kampung Sea Food Kedonganan dengan ramah tamah dengan jajaran Polresta Denpasar dan mengumpulkan informasi kasus dan kerawanan kejahatan yang ada di wilayah tersebut terutama tentang kasus Hoax dan Media Sosial di masyarakat.
- Pukul 19.30 – 22.00 WITA - Peserta dianmas dosen, melaksanakan kegiatan di pos Satkamling Jagabaya desa adat Kedonganan (depan wantilan desa kedonganan). Di sini Tim Dosen dibagi menjadi 3 bagian untuk Satkamling yang ada. Peserta dianmas dosen melaksanakan kegiatan
 1. Pos Satkamling Jagabaya desa adat kedonganan (depan satkamling jagabaya).
 2. Peserta dianmas dosen melaksanakan kegiatan di pos pantau jagabaya desa adat Kedonganan (Pasar Ikan Kedonganan).
 3. Peserta dianmas dosen melaksanakan kegiatan di pos BPKP2K pantai kedonganan



Gambar 1 - Rombongan Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri mengadakan kunjungan ke Balai Desa dan Pos Satkamling Desa Adat Kedongan di wilayah hukum Polsek Kuta (Rabu malam, 26 Juli 2023).

- Kami mendapat Satkamling di pos pantau Jagabaya desa adat Kedongan (Pasar Ikan Kedongan). Di pos ini begitu ramai kunjungan dan aktivitas baik turis dan masyarakat setempat. Kami beserta tim memberikan penyuluhan tentang kewaspadaan dan pencegahan kejahatan yang akan terjadi di sana terkait dengan tingkat kerawanan yang ada. Di sini dipertanyakan cara pencatatan kondisi dan observasi wilayah dikaitkan dengan aktivitas orang yang ada di sana oleh Jagabaya. Demikian juga bagaimana aktivitas penggunaan media social oleh turis yang dikaitkan dengan kerawanan yang akan terjadi pada satuan Kepolisian Polsek di sana. Kekhawatiran adalah adanya overlap penanganan kasus yang ada di wilayah Polsek tersebut. Kategori kriminalitas untuk kasus nasional dan adat menjadi pertimbangan mau dibawa kemana kasus kejahatan tersebut.



Gambar 2 - Tukar Pikiran dan Masukkan dari Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri pada anggota Jababaya di Satkamling Pasar Ikan di Desa Adat Kedongan di wilayah hukum Polsek Kuta (Rabu malam, 26 Juli 2023).

- Pukul 23.00 – Peserta dianmas Dosen Kembali ke hotel untuk beristirahat.

Hari Kamis, 27 Juli 2023

- Pukul 08.00 - 09.30 WITA - Peserta Dianmas Dosen melaksanakan kegiatan di SMA Negeri 1 Kuta. Dalam hal ini berupa penyuluhan dan tanya jawab tentang bahaya Hoaks dan Hatespeech kategori dan bagaimana jenisnya kejahatan cyber dimaksud. Di sini jelas bahwa peserta belum bisa membedakan antara kejahatan cyber dengan bukan dikaitkan dengan kegiatan interaksi dalam dunia digital. Kebanyakan peserta yang semuanya adalah siswa serampangan dalam menggunakan media social yang ada. Tidak memahami jenis kejahatan ini menunjukkan mereka menyepelekan kejahatan ini dan hal ini bisa membahayakan perekonomian di Bali, yakni; berkaitan dengan wisata. Kemudahan mereka tanpa memikirkan dan memperhitungkan imbas memposting atau unggah konten informasi memberikan indikasi siswa di Bali tidak memahami bahaya tuntutan hukum di balik unggahan informasi melalui media social. Di samping itu juga kepercayaan mereka akan adat yang dibalut oleh budaya setempat akan melindungi mereka dalam aktivitas dan interaksi digital membuat mereka makin percaya diri. Kesimpulannya adalah peserta pelatihan Dianmas sedemikian minim dengan cyber digital yang ada dan ini menjadi perhatian dan masukkan khusus untuk jajaran kepolisian setempat untuk gencar memberikan sosialisasi dan kampanye tentang kejahatan cyber. Penyuluhan diakhiri dengan pembagian buku dan souvenir dari tulisan kami pribadi.



Pengarahan dan Sosialisasi Hoax dan Sosial Media di SMA 1 Kuta Bali (Kamis pagi, 27 Juli 2023).



Suasana Dalam Kelas Pengarahan dan Sosialisasi Hoax dan Sosial Media di SMA 1 Kuta Bali – 1 (Kamis pagi, 27 Juli 2023).



Suasana Dalam Kelas Pengarahan dan Sosialisasi Hoax dan Sosial Media di SMA 1 Kuta Bali – 2 (Kamis pagi, 27 Juli 2023).

- 09.45 - 12.00 WITA – Peserta Dianmas Dosen peserta dianmas dosen melaksanakan kegiatan di SMA Soverdy Kuta masih tentang seputar Hoax, Hatespeech dan tuntutan hukum yang akan dikenakan bagi pelaku kejahatan tersebut. Konteks penegakkan hukum lebih diberikan pada porsi di sekolah ini bukan pada jenis kejahatannya saja. Di sini peserta Dianmas yang kebanyakan siswa dan ada juga beberapa guru sangat antusias mendengarkan dan memberikan tanggapan yang ada. Kasuistis yang mereka alami banyak dipertanyakan pada pemberi materi. Bagaimana melakukan pelaporan ke Polisi sampai dengan proses Restorative Justice dan kemungkinan adanya ADR (Alternative Dispute Resolution) dijelaskan dengan menjunjung tinggi keadilan dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Pola penyelesaian di luar peradilan dengan melibatkan tokoh adat, Babinkamtibmas dan Jagabaya dan Pecalang sudah sedemikian ‘mahfum’ dan biasa dilakukan di sana. Di sini mediasi dan negosiasi diperlukan guna penyelesaian kasus kejahatan cyber dengan mengutamakan Restorative Justice sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri untuk kasus kejahatan cyber. Bagaimana penindakan penegakkan hukum yang bisa dilakukan dengan pemberian sanksi disiplin bukan penegakkan hukum untuk kasus-kasus di sekolah karena diakui bahwa siswa kebanyakan adalah mereka yang masih di bawah umur atau belum dewasa, oleh sebab itu pola pembinaan oleh guru menjadi sedemikian penting. Para guru mengaku sulit melakukan kontrol penggunaan social media dan dunia digital siswa karena memang ada larangan melakukan Razia terhadap kepemilikan telepon cerdas pada siswa yang ada di klausul UU ITE sebagai dasar penindakan penegakkan hukum kejahatan cyber. Di sini dijelaskan dengan ada indikasi pelanggaran, maka bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan berdasarkan UU 2 tahun 2002 tentang penegakkan hukum sehingga tidak berbenturan dengan legalistik yang ada. Di sini juga diterangkan imbas dari kejahatan cyber hoax di beberapa negara yang begitu fatal dan merongrong kedaulatan Negara.

KALAM

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.2, No.3, Juli 2023



Suasana Dalam Kelas Pengarahan dan Sosialisasi Hoax dan Sosial Media di SMA Soverdy Kuta Bali – 1
(Kamis pagi, 27 Juli 2023).



Suasana Dalam Kelas Pengarahan dan Sosialisasi Hoax dan Sosial Media di SMA Soverdy Kuta Bali – 2
(Kamis pagi, 27 Juli 2023).

- Pukul 12.10 – 12.50 WITA – Makan siang dengan Karo SDM Polda Bali dan pelaporan kegiatan Dianmas Dosen kepada PJU Polda Bali, yang dalam hal ini diterima oleh Wakapolda Bali. Laporan diterima dan Kapolda Bali yang dalam hal ini diwakili Wakapolda Bali mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih besar pengabdian masyarakat Dosen STIK kepada masyarakat Bali khususnya untuk kasus kejahatan cyber dan imbas kepada industri

wisata Bali.

- Pukul 19.30 - 22.30 WITA - Peserta Dianmas Dosen melaksanakan kegiatan di pos induk Satkamling Desa Adat Tuban (Depan LPD Tuban). Dilakukan dengan tukar pikiran dan pendapat yang dibuka oleh Sekretaris Desa adat setingkat Carik dalam hal ini. Diperkenalkan tiap pejabat dan Jagabaya yang ada di desa adat Tuban juga Pecalang dan satuan Satkamling desa yang ada. Di sini dibahas tentang Tindakan dan perilaku yang diberikan oleh satuan keamanan adat terhadap para turis asing dan domestic yang ada di wilayahnya. Keramahan dan kebaikan tetap diajukan meski ketegasan dan disiplin harus ada dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan konteks nasional dalam hal ini. Tindakan turis yang tidak menghormati dan menghargai adat menjadi permasalahan utama. Demikian juga dengan trik deportasi dan penanganan pengungsi yang dalam hal ini adalah turis yang tidak mampu pulang menjadi kendala dan perhatian khusus desa Adat. Kemungkinan para pengungsi ini akan mengganggu keamanan dan ketenteraman daerah wisata di Bali. Selama ini Jagabaya dan Pecalang sudah sangat sabar dan mengutamakan rasa dalam melakukan Tindakan. Namun makin lama sikap dan jumlah pengungsi makin banyak dan menyulitkan desa adat dalam melakukan penanganan serius kasus ini.



Rombongan Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri berfoto bersama setelah berdiskusi seputar masalah-masalah sosial di Desa Adat Tuban (Kamis malam, 27 Juli 2023).

- Pukul 22.35-24.00 WITA - Peserta Dianmas Dosen melaksanakan kegiatan di pos pantau satkamling desa adat Tuban (komplek burung Tuban), kemudian peserta Dianmas Dosen melaksanakan kegiatan di pos pantau Sempati Putra Satkamling desa adat Tuban (Jl. Sempati Tuban). Pada kedua Satkamling dijelaskan tentang kewaspadaan dan perpolisian masyarakat yang ada terutama dengan mengutamakan kerja pada polisi RW yang dicanangkan Polri dalam beberapa saat ini. Demikian juga dengan kewaspadaan dan Kerjasama dengan para turis dengan melakukan perpolisian yang ada dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri sudah berjalan kondusif seperti yang diharapkan, semua pihak menerima dan mengikuti masukan dan arahan dari tim pengabdian masyarakat oleh dosen dari STIK terkait dengan kasus yang ada.
2. Masukan dan arahan dari dosen dan jajaran STIK terhadap Satkamling Jagabaya dianggap peserta sedemikian kondusif. Kehadiran para Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri dirasa sangat penting karena bisa membahas tentang kasus-kasus sosial terutama kasus-kasus hoax dan media sosial yang terkait dengan kejadian-kejadian di Bali sehubungan dengan kehadiran turis asing serta para pendatang dari propinsi lain. Hal ini memberikan bagaimana sikap dan tindakan yang harus diberikan oleh tenaga keamanan di Bali.
3. Sehubungan dengan pengarahan dan pengabdian masyarakat oleh para dosen Lemdiklat Polri, terlihat para pelajar sekolah menengah umum di dua sekolah yang dikunjungi merasa terbantu dan banyak mendapatkan informasi tambahan dan bagaimana mereka bisa bertindak sehubungan dengan kasus hoax dan hatespeech dalam kasus di Polda Bali yang tercampur dengan kehadiran orang asing dan turis yang ada di wilayahnya.
4. Dengan kehadiran pengarahan dan pengabdian masyarakat oleh dosen STIK para peserta yang terdiri dari petugas Jagabaya dan Pecalang di Satkamling desa adat dan pihak sekolah Sekolah Menengah Atas merasa sangat terbantu dengan masukan dan arahan yang diberikan juga bisa bertukarpikiran tentang isu-isu terkini dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta mengharapkan kegiatan ini menjadi rutin dalam keperluan pengembangan kamtibmas dan harkambtibmas dalam menjaga keamanan di Polda Bali.

REKOMENDASI

1. Sehubungan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat STIK Lemdiklat Polri maka dirasa perlu menambah alokasi anggaran sehingga para Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri bisa lebih leluasa melakukan manuver target kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga jangkauan Polresta yang dituju juga lebih luas dengan hasil yang lebih maksimal dalam keperluan pemencaran ilmu dan aplikasi keilmuan yang ada.
2. Polda Bali harus lebih terbuka dan menerima masukan berarti seputar kejadian dan prediksi kejadian yang bisa terjadi di lingkungan Polda Bali dengan kerap melakukan kunjungan dan masukan dalam bentuk tanya jawab kepada masyarakat karena sedemikian kondusif sikap masyarakat akan antusiasme pada pemeliharaan keamanan sehubungan dengan kasus media sosial.
3. Perlu penggiatan dan penguatan pelatihan-pelatihan kepada para bhabinkamtibmas di wilayah hukum mereka sehingga para bhabinkamtibmas ini bisa menularkannya kepada anggota masyarakat, khususnya para warga yang tergabung dalam Satkamling di desa binaan.
4. Perlu diadakan pelatihan lanjutan kepada peserta Jagabaya dan Pecalang di Satkamling desa binaan dalam penanganan kasus-kasus sosial terutama dikaitkan isu hoax dan hatespeech terutama dalam penerapan restorative justice dengan penguatan pada interaksi sosial pada masyarakat.
5. Bagi lingkungan sekolah dan para pemangku kepentingan di sana untuk lebih memperhatikan pada pemahaman akan pencegahan dan penanggulangan kasus kejahatan sehubungan dengan

penggunaan telepon cerdas dengan hoax dan hatespeech. Semua diketahui bahwa sedemikian minimnya informasi tentang seputar kejahatan cyber digital di lingkungan sekolah.

6. Sedemikian tinggi tingkat kehausan informasi dan rendahnya pemahaman masyarakat akan kejahatan cyber maka diharapkan anggota bhabinkamtibmas lebih memaksimalkan pertemuan untuk menggali kejadian-kejadian dan kasus-kasus yang terkini tentang hoax dan hatespeech terkait dengan kejadian di lingkungan remaja.
7. Agar semua pihak terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan hukum terbaru menyangkut kasus criminal cyber digital pada lingkungan remaja dengan dihubungkan kehadiran para turis asing sehingga masyarakat memiliki wawasan yang memadai tentang hal tersebut.
8. Di satu sisi semua pemangku kepentingan dapat duduk bersama membahas masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali, khususnya di wilayah Polsek Kuta sehingga lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif dapat diwujudkan.
9. Kasus hoax dan hatespeech banyak siswa yang sedemikian minim pemahaman tentang criminal cyber digital, sehingga kadang merasa kejahatan cyber dianggap biasa dan tidak memahami delik hukum dan pengajaran hukum yang bisa terjadi pada diri mereka.
10. Permasalahan tentang seputar seks dan Tindakan senonoh dalam digital yang tidak dipahami menjadi masalah besar dalam pemanfaatan media social bagi siswa pada tingkat sekolah menengah atas yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini didanai oleh Mabes Polri melalui Lemdikpolri pada Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat STIK. Tim Pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ketua STIK Lemdikpol, Waket Kermadianmas dan Kapolda Bali, Wakapolda Bali dan Kapolrestabes Bali. Sehingga, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga pada semua pihak yang menyambut kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Lu Peng, Lin Wang, Xue-Yi Ai & Yu-Rong Zen (2020). "Forecasting Tourist Arrivals via Random Forest and Long Short-term Memory," *journal Cognitive Computation* volume 13, pages. 125–138.
- Prisgunanto, Ilham (2015). *Komunikasi dan Polisi Edisi 3*. Jakarta: Prisani Cendekia
- Prisgunanto, Ilham (2020). "Social media and visit decision to tourist destinations: Measuring the impact of instagram on expatriates in Indonesia," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, Vol. 36 No. 1.
- Priyanto, Anang (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak.
- Syarifuddin, Muhammad Gifari, Prisgunanto, Ilham dan Prianggono, Jarot (2023). "Model Organizational Citizenships Behavior Dalam Meningkatkan Kinerja Kepolisian: di Wilayah Hukum Polresta Mataram," *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 2 No. 2.